

Judul : 10 Opsi Komite Reformasi Polri
Tanggal : Selasa, 18 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

10 Opsi Komite Reformasi Polri

Adrianus Meliala
Kriminolog Guru Besar FISIP UI

Analogi "Rumah Makan Padang" kemungkinan cocok diterapkan pada situasi yang dihadapi Komite Reformasi Polri yang baru saja dikantik Presiden RI. Aneka makanan terhidang di meja dapat diibaratkan sejumlah persoalan yang dihadapi komite itu. Saat makanan tertentu diambil, dapat diibaratkan opsi permasalahan yang hendak dipecahkan melalui saran kebijakan yang dihasilkan komite tersebut. Terkait makanan yang tidak diambil bukannya kurang enak. Mungkin dianggap mahal atau tidak menyenangkan, yang dalam bahasa kebijakan diartikan kebijakan yang kurang berdampak atau kurang menguntungkan.

Jadi, masalah yang dihadapi komite tersebut bukanlah karena di Polri tidak ada masalah, melainkan memilih hendak memecahkan masalah yang mana, atau mulai dari mana, dan dengan cara apa.

Dalam konteks membantu komite tersebut guna memilih permasalahan yang sebaiknya diprioritaskan untuk diselesaikan melalui satu atau lebih strategi, kebijakan, serta program, maka tulisan ini mengulas sepuluh opsi.

Posisi Polri

Opsi satu, Polri di bawah kementerian. Perbincangan paling sensitif yang dihadapi komite adalah apakah Polri tetap menjadi institusi langsung di bawah presiden atau diantarai oleh kementerian. Pembandingan paling dekat adalah Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Diskusinya sama: jika TNI di bawah kementerian, mengapa Polri tidak di bawah Kementerian Keamanan atau Kementerian Pemolisian? Selama ini beberapa pembenaran diajukan kepolisian, walau tetap bermasalah secara hukum tata negara.

Opsi dua, Polri di bawah Komisi Kepolisian Nasional. Kalau Polri alergi di bawah kementerian lama atau baru, opsi yang bisa dipilih adalah berbasis pengalaman Kepolisian Jepang, yakni kepolisian di bawah Kompolnas. Jadi, Kompolnas menjalankan fungsi eksekutif melalui kelompok komisineranya, dengan Kapolri di dalamnya.

Jika opsi ini yang dipilih, tentu perlu memperkuat Kompolnas. Tidak seperti saat ini, Kompolnas praktis tidak punya kewenangan berarti. Kembali mengacu pada Jepang, penting memberikan kewenangan perencanaan dan anggaran kepada Kompolnas sehingga Kapolri dalam hal ini berperan sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat Kompolnas.

Opsi tiga, Kapolri tidak hadir di sidang kabinet. Terlepas opsi satu atau dua yang dipilih, ada baiknya Kapolri tidak lagi hadir di sidang kabinet. Langkah ini untuk memastikan netralitas dan obyektivitas kepolisian selaku penegak hukum. Jadi, posisinya seperti Mahkamah Agung.

Kalaupun Kapolri tetap dianggap perlu mengikuti Sidang Kabinet, harus dipastikan perlakuannya adalah Polri sebagai lembaga negara, bukan sebagai lembaga eksekutif bagian dari pemerintah. Perlu pula dipastikan, yang dibicarakan Kapolri di kabinet bukan terkait tugas selaku penegak hukum.

Opsi empat, kewajiban Satuan Wilayah Polri menjalankan pemolisian demokratis. Esensi terutamanya dari pemolisian demokratis adalah kepolisian menghargai lembaga demokratis yang menjadi perwakilan penampung aspirasi politik masyarakat. Salah satu bentuknya adalah komunikasi intens dengan parlemen, di tingkat pusat dan daerah.

Para kasatwil wajib berkolaborasi perihal bagaimana pelaksanaan keamanan ketertiban masyarakat di daerah itu, dengan cara bagaimana masyarakat (lewat wakil rakyat) ingin diamankan, bisa dengan pemolisian yang reaktif, berbasis komunitas, atau yang lain.

Jika penegakan hukum adalah tugas kepolisian yang imperatif dan berjarak, tidak mengharuskan kepolisian dekat dengan pihak mana pun, berbeda halnya dengan tugas pemeliharaan kamtibmas. Kepolisian harus bernegosiasi dengan masyarakat yang hendak di-polisi-i, melalui perwakilan-nya di DPR atau DPRD.

Dengan demikian, implementasi pemolisian demokratis ini lebih luas dari pemahaman

kalangan internal Polri yang melihat perwujudan tugas kepolisian harus secara demokratis saat "menyentuh" publik.

Organisasi Polri

Opsi lima, Polri sebagai organisasi terbuka. Salah satu kelemahan publik terhadap Polri adalah menyangkut banyaknya perwira menengah dan perwira tinggi, aktif atau pensiun, yang ditempatkan di luar struktur Polri. Walaupun kerap muncul dalih Polri diundang dan anggotanya dibutuhkan, tetapi juga perlu disinyalir instansi yang mengurus digital agar menjadi mitra Komdigi serta Badan Sandi dan Siber Negara.

Opsi enam, format fungsi Polri tidak lagi *end-to-end*. Polri kerap dituntut karena menjadi organisasi yang besar dan gemuk. Padahal, organisasi yang besar itu adalah konsekuensi dari rentang tugas dan fungsi Polri yang panjang. Mulai dari instansi terkait penyimpangan/kejahatan di masyarakat sebelum terjadi (fungsi preventif), instansi yang bertugas mencegah penyimpangan/kejahatan (fungsi represif).

Dari tiga fungsi itu kemudian tergelar beberapa instansi, seperti Badan Intelijen Keamanan, Badan Pemelihara Keamanan, dan Korps Brigade Mobil. Mengingat Polri dianggap tidak lagi efisien dan taktis karena sudah terlalu panjang dan gemuk, bisa dipertimbangkan "memotong" satu atau lebih instansi menjadi instansi yang berdiri sendiri atau digabung instansi lain. Baintelkam bisa dipertimbangkan masuk rumput instansi yang menjalankan fungsi intelijen. Brimob juga bisa dilepas dari, mengacu peng-

alaman beberapa negara, menjadi satuan polisi paramiliter yang berdiri sendiri.

Opsi tujuh, restrukturisasi ulang organisasi Polri. Komite Reformasi Polri juga bisa menata atau merestrukturisasi ulang organisasi Polri. Contoh, instansi yang memiliki karakter pengawasan ada baiknya digabung menjadi satu divisi sehingga memudahkan koordinasi. Demikian pula perlu divisi forensik yang menggabungkan Puslabfor, Pusidam, Dokpol, dan instansi terkait lainnya. Juga perlu disinyalir instansi yang mengurus digital agar menjadi mitra Komdigi serta Badan Sandi dan Siber Negara.

Opsi delapan, stop normalisasi korupsi. Komite Reformasi Polri dapat secara khusus membidik kecenderungan normalisasi korupsi. Saat kepolisian masih memiliki kekurangan anggaran, praktik korupsi pada umumnya dianggap sebagai upaya sah untuk menambah kekurangan—anggaran. Namun, dengan anggaran yang kini meningkat, anggapan tersebut harus diubah.

Kegiatan pemolisian, juga manajemen organisasi kepolisian, harus sepenuhnya bersandar pada anggaran negara dengan segala implikasinya. Jika masih terdapat dalih, anggaran negara membuat Polri tidak responsif melayani masyarakat, itulah klah tradisional yang biasa terdengar dalam rangka menormalisasi korupsi.

Isu kultural

Opsi sembilan, kurangi budaya paramiliter. Polri kerap diujat terkait penggunaan kekerasan yang eksekutif. Pemukulan, bahkan penganiayaan, konon masih terjadi. Kekerasan pada dasarnya satu dari cukup banyak artefak yang biasa terlihat saat kepolisian menjalankan pemolisian paramiliter. Artefak yang lain, seperti seragam, kepangkatan, tata perilaku, dan pola operasi yang semuanya mirip, bahkan mungkin sekali sama, dengan militer. Kekerasan dengan demikian tak terhindarkan terus terjadi, mengingat pada dasarnya militer adalah organisasi pengelola kekerasan secara sistematis. Dengan berkurangnya artefak itu, ke-

kerasan diperkirakan berkurang dan budaya sipil yang demokratis akan meningkat.

Opsi sepuluh, pengawasan terhadap penggunaan upaya paksa. Kekerasan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan oleh anggota Polri juga kerap menjadi sorotan yang menurunkan citra Polri. Jika dikatakan kekerasan, pastilah itu sudah berlebihan dari kebutuhan saat Polri memaksa orang saat ditangkap, ditahan, dideleah, disita, diinterogasi, ataupun ditembak saat melawan. Terkait aktivitas itu, tentu tidak ada orang yang sukarela mau ditahan. Namun, paksaan tidak sama dengan kekerasan.

Untuk itu, komite bisa menambah/menambahkan mekanisme pengawasan anggota yang menjalankan tugas ini agar tercegah melakukan kekerasan.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan, dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Kemenangan bagi semua di Borobudur Marathon. Namun, yang terpecah tetap satu saja kan?

Orang sukut tetap bisa dapat visa AS. Semoga bisa jadi obat.

Investor kian lirik saham perusahaan milik konglomerat. Kalau ini, maunya yang pasti-pasti saja.

Mang Usil